



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022

**DINAS KOPERASI,
UKM DAN TENAGA
KERJA KOTA BLITAR**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan HidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dengan bergulirnya era reformasi membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini untuk berubah menjadi lebih baik dengan mengakomodasi praktek-praktek pemerintahan yang baik atau lazim disebut "good governance" dan mewadahi aspirasi dan partisipasi masyarakat di segala bidang pemerintahan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Mengacu pada aturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2022 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2022. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran selalu ada permasalahan-permasalahan atau beberapa kekurangan-kekurangan di dalam pencapaian kinerja yang menggambarkan kurang fokusnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2022. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan kurnia-Nya kepada kita semua, Amin.

Blitar, Pebruari 2023

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kota Blitar



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	7
C. Maksud dan Tujuan	12
D. Dasar Hukum	13
E. Aspek-Aspek Strategis	15
F. Isu-Isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis 2021 - 2026	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	38
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022	41
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022	44
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra	45
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	46
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	46
1. Alokasi per Sasaran Pembangunan	46
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	50
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
C. Prestasi/Penghargaan	
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Langkah Perbaikan	52

Lampiran

1. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpijak pada aturan dan tatanan dapat dibuktikan dengan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam mengemban aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN. Upaya tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan

akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula berorientasi pada uang (input oriented) menjadi orientasi pada hasil (result oriented) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2022 ini disusun untuk mengukur tingkat kinerja kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk meningkatkan kinerjanya dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Blitar Tahun 2022. Perencanaan yang dimaksud tersusun dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 2021-2026, Rencana Kinerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2022 dan Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dilanjutkan dengan Pengukuran Kinerja melalui pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja, serta menggunakan hasil dari laporan capaian kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip jujur, obyektif, akurat dan transparan, sistem pengukuran kinerja yang disajikan dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator sub kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator sub kegiatan, kegiatan dan program dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA Kota Blitar, sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga

- kerja;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
 4. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelayanan izin usaha simpan pinjam;
 5. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 6. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
 7. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 8. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 9. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro;
 10. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah;
 11. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan tenaga kerja;
 12. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
 13. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penempatan tenaga kerja;
 14. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan hubungan industrial;
 15. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
 16. pelaksanaan pengendalian; pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelola anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 17. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 18. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

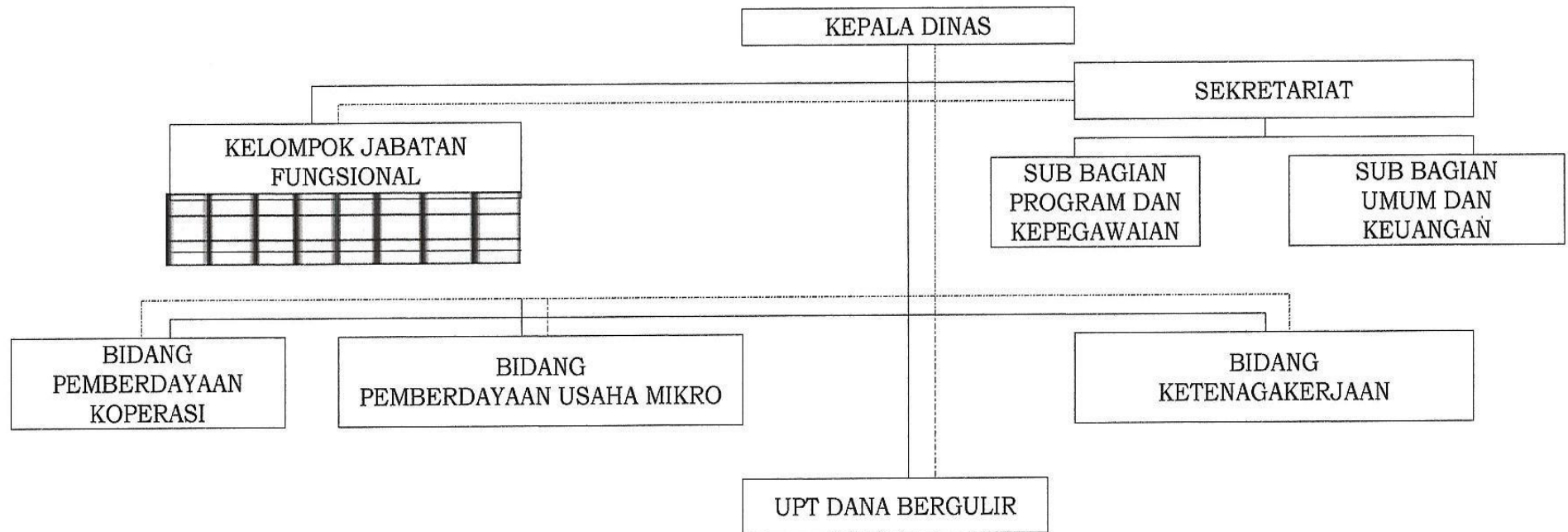
Operasional Prosedur (SOP);

19. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
20. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
21. pengelolaan pengaduan masyarakat;
22. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
23. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; dan
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
5. Bidang Ketenagakerjaan;
6. UPT Dana Bergulir; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 19 TAHUN 2022



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tersebut, didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) personil. Adapun penggolongan pegawai disajikan dalam tabel berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	10
2.	PEREMPUAN	17
JUMLAH		27

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Jabatan

NO.	PENDIDIKAN	ESELON			STAF	JUMLAH
		II	III	IV		
1.	S-2	1	1	-	-	2
2.	S-1		3	10	3	16
3.	D3	-	-	-	-	-
4.	SLTA	-	-	2	7	9
5.	SLTP	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	4	12	10	27

Berdasarkan Eselon

NO.	URAIAN JABATAN	JUMLAH
	STRUKTURAL JABATAN	
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	4
3.	ESELON IV	3
4.	JABATAN FUNGSIONAL	9
5.	STAF	10
JUMLAH		27

Berdasarkan Golongan / Pangkat

NO	GOL.	JENIS GOLONGAN				JUMLAH
		A	B	C	D	
1.	IV	2	2	-	-	4
2.	III	3	1	-	12	17
3.	II	-	-	1	5	6
4.	I	-	-	-	-	-
JUMLAH						27

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	Jabatan	JUMLAH
1.	Struktural	6 orang
2.	Non Struktural	21 orang
JUMLAH		27 orang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada Tahun 2022, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya;

6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja tahun 2022 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;

19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

E. Aspek-Aspek Strategis

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja di Kota Blitar untuk mengemban tugas pokok dan fungsinya mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016.
- Permenkop & UKM No.10/PER/M.KUKM/IX/2015 dan Permen Ketenagakerjaan No.39 Tahun 2016
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

b. Kelemahan

- Masih terbatasnya tenaga perkoperasian dan usaha mikro yang kompeten

untuk melakukan pemasaran produk yang dihasilkan.

- Masih kurangnya SDM yang menguasai IT.
- Pengemasan produk masih belum berdaya saing.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Terjalannya kerjasama yang baik dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Blitar dalam upaya peningkatan pelayanan.
- Terjalannya kerjasama yang baik dengan Lembaga dan Kementrian terkait.

b. Kendala

- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk bergabung di lembaga koperasi dan usaha mikro terutama generasi muda.
- Adanya intimidasi dari golongan masyarakat pelaku ijon/rentenir.
- Ketrampilan pencaker tidak sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja

F. Isu-Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja
2. Optimalisasi pengembangan Usaha Mikro
3. Inisiasi pemasaran Usaha Mikro berbasis digital
4. Optimalisasi pengembangan koperasi

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar, wajib menyusun rencana strategis sebagaimana amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) : Perangkat daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD.

RENSTRA Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2021-2026, merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4). Selain itu RENSTRA juga merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar 2021-2026 tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan disusun dengan mengacu visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KOTA BLITAR TAHUN 2022**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Progr am/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Awal (2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022			
							K	Rp		
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		2.17		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83,36	83,56	3.199.453.439	Dinas Koperasi, UKM danTenaga Kerja	Dinas Koperasi, UKM danTenaga Kerja
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	2.17		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83,36	83,56	3.199.453.439	Sekretariat Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
		2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	80,87	81,00	3.199.453.439		
		2.17.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	%	100%	100 %	10.039.600		

		2.17.01.20 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	2	2	5.769.700		
		2.17.01.20 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen pelaporan yang tersusun	Dokumen	3	3	4.269.900		
		2.17.01.20 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	%	100%	100%	2.602.197.489		
		2.17.01.20 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Orang	21	23	2.602.197.489		
		2.17.01.20 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standar	%	100 %	100 %	200.000.000		
		2.17.01.20 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Event		2	200.000.000		
				Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Publikasi		2			
		2.17.01.20 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum PD sesuai standar	%	100 %	100 %	222.124.350		

		2.17.01.20 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Komponen		15	4.792.600		
		2.17.01.20 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	Macam		2	1.493.800		
		2.17.01.20 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jenis		12	11.408.800		
		2.17.01.20 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis		29	31.265.200		
				Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Dos		750			
				Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	Porsi		150			
		2.17.01.20 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jenis		8	27.319.200		
		2.17.01.20 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU an	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Eksemplar		24	5.400.000		
		2.17.01.20 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Rakor		17	140.444.750		

		2.17.01.20 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	%	100%	100%	48.089.200		
		2.17.01.20 8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Rekening		4	48.089.200		
		2.17.01.20 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100%	100 %	117.002.800		
		2.17.01.20 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Unit		3	75.376.400		
				Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit		10			
		2.17.01.20 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Unit		1	22.280.000		

		2.17.01.20 9.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jenis		3	19.346.400		
				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jenis		3			
Menurunnya tingkat pengangguran				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,53	70,00	960.074.050	Bidang Ketenagakerjaan	
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja			Persentase pencari kerja yang berkompeten	Persen	NA	80	902.344.950		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	Persen	47,7	46	809.381.850		
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	Persen	NA	82	809.381.850		
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berdasarkan klaster kompetensi	orang	42	160	809.381.850		

			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	82,98	77	92.963.100		
				Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	Persen	0	12	-		
			Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	Jumlah pencari kerja terdaftar	orang	383	170	41.346.100		
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta sosialisasi pencari kerja korporasi		150	150	41.346.100		
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	Persen	NA	30%	51.617.000		
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang mengakses aplikasi IPK	orang	NA	100	50.000.000		
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang melamar kerja pada jobfair	orang	NA	30	1.617.000		
	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan			Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persen	NA	16	57.729.100		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	Persen	100%	100	57.729.100		

			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	25	55	57.729.100		
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi UMK dan peraturan ketenagakerjaan	Orang	300	75	26.031.500		
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Persh yg Berakibat/Berdampak pd Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diproses	Kasus	9	1	8.594.700		

			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah dokumen hasil verifikasi/ rekomendasi bidang ketenagakerjaan	Dokumen	1	1	23.102.900		
Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah				Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	%	2,02	2,05		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
	Meningkatnya koperasi aktif			Persentase Koperasi Aktif	%	35	35,6%	404.040.250	Bidang Pemberdayaan Koperasi	
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	%	21	22	34.255.200		
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam utk Koperasi dengan Wilayah Kenggotaan dlm Daerah Kab /Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	Koperasi	NA	3	34.255.200		

			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam memenuhi izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Koperasi	NA	10	34.255.200		
				- Jumlah koperasi simpan pinjam yang telah didata	Koperasi	278	278			
				- Jumlah koperasi simpan pinjam yang didampingi	Koperasi		50			
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	%	35	35,7	369.785.050		
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	Orang	65	71	369.785.050		

			Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	- Jumlah peserta pelatihan IT	Orang		40	369.785.050		
				- Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Orang		80			
				- Jumlah peserta pelatihan perkoperasian	Orang		80			
				- Jumlah laporan monev pelatihan	Laporan		1			
	Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi			Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	%	34	35	390.192.900	Bidang Pemberdayaan Koperasi	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	%	32	33	111.629.100		
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	%	27	28	111.629.100		

			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi penerima dana bergulir yang dimonev	Koperasi		80	11.629.100		
				Jumlah laporan monev	Laporan		1			
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penerima hibah	Lembaga		1	100.000.000		
				Jumlah laporan monev pemeriksaan lembaga penerima hibah	Laporan		1			
				Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan	Koperasi		78			
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	%	28	29	65.383.200		
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP	%	100	100	65.383.200		

			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah peserta pelatihan akuntabilitas koperasi	Orang		100	65.383.200		
				Jumlah peserta pelatihan yg melakukan penilaian mandiri	Orang		100			
				- Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	Koperasi		100			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN & PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	%	30	32	213.180.600		
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yg Keanggotaannya dlm daerah Kab/Kot	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	%		11	213.180.600		
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi & restrukturisasi Usaha koperasi Kewenang Kab/Kota	- Jumlah koperasi peserta pameran produk unggulan	Koperasi		30	213.180.600		
				- Jumlah aplikasi koperasi yg di update	Aplikasi		1			
				Jumlah koperasi yg dilakukan update data	Koperasi		278			
				Jumlah jenis produk unggulan yang laku dijual	Produk		5			

	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas			Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	1,72	1,8	484.329.600	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	%	1,72	1,8	484.329.600		
				Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	%	2	2,2			
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	%		100	484.329.600		
				Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan	%		0,4			
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen hasil pendataan UM	Dokumen		1	86.663.900		
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	- Jumlah UM penerima dana bergulir yang dimonev	UM		25	96.994.000		

				Jumlah laporan monev pengawasan dana bergulir	Laporan		1			
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	- Jumlah peserta pelatihan bagi UM	Orang		70	84.630.500		
				-Jumlah laporan Monev pelatihan	Laporan		1			
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	- Jumlah UM yang mengikuti pameran produk unggulan	UM		50	216.041.400		
				- Jumlah jenis produk unggulan UM yg terjual melalui pameran	Produk		5			
	Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru			Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	%		1,6	238.812.400	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	%	1,5	1,6	238.812.400		
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase kelurahan yang memiliki WUB minimal 2	%		100	238.812.400		

			Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	- Jumlah peserta pelatihan bagi calon WUB	Orang		100	238.812.400		
				- Jumlah calon WUB yang didampingi	Orang		50			

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Implementasi penjabaran rencana strategis dalam rangka mencapai visi dan misi, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja ini merupakan penuangan dari Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja beserta targetnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada awal tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	35,6 %
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	35 %
3	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang Naik kelas	1,80 %
4	Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru	1,60 %
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,56)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp 34.255.200	DAU
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 111.629.100	DAU
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 65.383.200	DAU
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 404.200.000	DAK Non Fisik (P2UKM)
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 213.180.600	DAU
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 484.329.600	DAU
7	Pengembangan UMKM	Rp 238.812.400	DAU

8	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.400.307.048	DAU dan DBHCHT
	TOTAL	Rp 4.952.097.148	

Dengan diterbitkannya Perwali No.19 Tahun 2022 tentang perubahan nomenklatur Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja maka dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sebagai berikut:

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	35,6 %
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	35 %
3	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang Naik kelas	1,80 %
4	Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru	1,60 %
5	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Berkompeten	80 %
6	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	16 %
7	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,56)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp 34.255.200	DAU
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 111.629.100	DAU
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 65.383.200	DAU
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 404.200.000	DAK Non Fisik (P2UKM)
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 213.180.600	DAU
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan	Rp 484.329.600	DAU

	Usaha Mikro (UMKM)		
7	Pengembangan UMKM	Rp 238.812.400	DAU
8	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 359.381.800	DAU
9	Penempatan Tenaga Kerja	Rp 477.966.000	DAU
10	Hubungan Industrial	Rp 107.729.000	DAU
11	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.400.307.048	DAU
	TOTAL	Rp 5.897.173.948	

Seiring dengan Perubahan Anggaran (PAK) maka pada tanggal 18 Oktober 2022 diadakan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sebagai berikut:

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	35,6 %
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	35 %
3	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang Naik kelas	1,80 %
4	Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru	1,60 %
5	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Berkompeten	80 %
6	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	16 %
7	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,56)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp 56.255.200	DAU
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 186.605.000	DAU
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 65.383.200	DAU
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 404.200.000	DAK Non Fisik

			(P2UKM)
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 363.180.600	DAU dan DID
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 729.952.900	DAU dan DID
7	Pengembangan UMKM	Rp 183.563.300	DAU
8	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 2.292.370.300	DBHCHT
9	Penempatan Tenaga Kerja	Rp 363.469.700	DAU
10	Hubungan Industrial	Rp 107.728.900	DAU
11	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.161.618.069	DAU
	TOTAL	Rp 8.914.327.169	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, tidak terlepas pula dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan

evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus tingkat realisasi positif sebagai berikut:

1. Tingkat Realisasi Positif = CAPAIAN	=	Realisasi	X 100 %
		Target	

2. Tingkat Realisasi Negatif =CAPAIAN	=	(2xTarget-Realisasi)	X 100 %
		Target	

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil

4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil
----	--------	---------------------------------	----------------

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET Th. 2022	REALISASI Th. 2022	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten	80 %	66%	82,5
2.	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenaga kerjaan	16 %	30%	187,5
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	35,6%	48,9%	137,36
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	35 %	39%	111,43
5.	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,80%	1,83%	101,67
6.	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,60%	1,62%	101,25
7.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,56	83,18	99,55

ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	% CAPAIAN	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten	82,5		√		
2.	Meningkatnya	Persentase	187,5	√			

	perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Perusahaan yang patuh aturan Ketenagakerjaan					
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	137,36	√			
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	111,43	√			
5.	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	101,67	√			
6.	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	101,25	√			
7.	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,55	√			
Rata – rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis / Sasaran			117,32	Sangat Berhasil			

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

Analisis atas pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada tahun 2022 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan tenaga Kerja Kota Blitar.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja mempunyai indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja Kompeten dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase Pencari Kerja Kompeten	80 %	66%	82,5

Keterangan :

Capaian kinerja pada sasaran ini tercapai 66% dari target 80% dikarenakan banyaknya kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan kerja serta pencari kerja Kota Blitar lebih tertarik pada lowongan kerja yang ada diluar Kota Blitar. Kegiatan yang sudah dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja adalah melaksanakan pelatihan, pendampingan kepada naker korban PHK dan memberikan informasi lowongan kerja melalui media social.

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan
Indikator Kinerja Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenaga kerjaan dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenaga kerjaan	16%	30%	187,5

Keterangan :

Capaian kinerja pada sasaran ini tercapai 30% dari target kinerja 16%, dengan adanya kegiatan Sosialisasi UMK secara rutin ke perusahaan di Kota Blitar serta pembinaan dan pendampingan sehingga terhindar terjadinya konflik di perusahaan.

- c. Sasaran 3 : Meningkatnya Koperasi Aktif mempunyai indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase Koperasi Aktif	35,6 %	48,9%	137,36

Keterangan :

Realisasi capaian kinerja 48,9% dari target yang ditetapkan 35,6% hal ini didukung oleh banyaknya koperasi yang melakukan update NIK (Nomor Induk Koperasi) dan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Fungsional Pengawas Koperasi.

- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi Indikator Kinerja Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	35 %	39%	111,43

Keterangan :

Realisasi capaian kinerja 39% dari target yang ditetapkan 35%, kegiatan yang telah dilakukan yaitu pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan bagi koperasi khususnya pengurus, pengawas serta anggota koperasi.

- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas mempunyai indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	1,8 %	1,83%	101,67

Keterangan :

Realisasi Capaian kinerja 1,83% dari target kinerja 1,8% dengan rincian sebanyak 271 UM yang omzetnya naik dibagi jumlah UM seluruhnya 14.829. sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah melalui pelatihan, mengikutsertakan UM pada kegiatan pameran local maupun regional serta pendampingan kepada pelaku usaha mikro yang didukung dengan pendataan yang berkelanjutan.

- f. Sasaran 6 : Meningkatnya Wirausaha Baru Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,6 %	1,62%	101,25

Keterangan :

Realisasi capaian kinerja 1,62% dengan target 1,6% dengan kategori tercapai yang didukung dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku wirausaha baru.

Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Th 2021	REALISASI Th. 2021	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS 2022	INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022	Target Th 2022	REALISASI Th. 2022
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	85%	87,5%	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	35,6%	48,9%
		Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	82%	86,07%	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	35 %	39%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,72%	1,09%	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,80%	1,83%
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	2%	3,24%	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,60%	1,62%
					Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten	80 %	66%

					Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenaga kerjaan	16 %	30%
					Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,56	83,18

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET Akhir RPJMD/Renstra	REALISASI s.d Th. 2022	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten	90	66%	73,33
2.	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenaga kerjaan	22	30%	136,36
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	39,5	48,9%	123,79
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	39	39%	100
5.	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	2	1,83%	91,5
6.	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	2	1,62%	81
7.	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	83,18	97,86

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI s.d Th. 2022	REALISASI Nasional	Ket
1.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten	66%	-	-
2.	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenaga kerjaan	30%	-	-
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	48,9%	-	-
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	39%	-	-
5.	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,83%	-	-
6.	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,62%	-	-
7.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,18	-	-

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)

Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
URUSAN TENAGA KERJA			
Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.292.370.300	2.290.298.678	99,91
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.292.370.300	2.290.298.678	99,91
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.292.370.300	2.290.298.678	99,91

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	363.469.700	310.276.366	85,37
Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	310.456.500	286.616.866	92,32
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	310.456.500	286.616.866	92,32
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	53.013.200	23.659.500	44,63
Job Fair/Bursa Kerja	53.013.200	23.659.500	44,63
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	107.728.900	97.149.600	90,18
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	107.728.900	97.149.600	90,18
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 Daerah Kab/Kota	76.031.400	71.569.000	94,13
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.579.500	1.071.000	29,92
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	28.118.000	24.509.600	87,17
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	56.255.200	54.628.000	97,11
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dlm Daerah Kabupaten/Kota	56.255.200	54.628.000	97,11
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.255.200	54.628.000	97,11

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	186.605.000	186.605.000	100,00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	186.605.000	186.605.000	100,00
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	86.605.000	86.605.000	100,00
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100,00
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	65.383.200	65.382.200	100,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.383.200	65.382.200	100,00
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65.383.200	65.382.200	100,00
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	404.200.000	399.261.100	98,78
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	404.200.000	399.261.100	98,78
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.200.000	399.261.100	98,78
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	363.180.600	362.691.900	99,87
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	363.180.600	362.691.900	99,87
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	363.180.600	362.691.900	99,87
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	729.956.300	690.721.017	94,62

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	729.956.300	690.721.017	94,62
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	86.663.900	86.663.900	100,00
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	96.994.000	96.990.600	100,00
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	216.041.400	202.442.867	93,71
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	330.257.000	304.623.650	92,24
Program Pengembangan UMKM	183.563.300	183.563.300	100,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	183.563.300	183.563.300	100,00
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	183.563.300	183.563.300	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.161.618.069	3.942.316.627	94,73

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya, dikarenakan pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat multiplier effect bagi indikator lainnya.

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten	80 %	66%	82,5	2.655.840.000	2.600.575.044	97,92
2.	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenagakerjaan	16 %	30%	187,5	107.728.900	97.149.600	90,18
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	35,6%	48,9%	137,36	460.455.200	453.889.100	98,57
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	35 %	39%	111,43	615.168.800	614.679.100	99,92
5.	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,80%	1,83%	101,67	729.956.300	690.721.017	94,62
6.	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,60%	1,62%	101,25	183.563.300	183.563.300	100,00
7.	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,56	83,18	99,55	4.161.618.069	3.942.316.627	94,73

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa efiseiensi penggunaan anggaran atas kinerja sebagai berikut:

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran / Program	Indikator	Rata –Rata % Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
1.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten	82,5	97,92	0,84	
2.	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenaga kerjaan	187,5	90,18	2,08	
3.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	137,36	98,57	1,39	
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	111,43	99,92	1,16	
5.	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	101,67	94,62	1	
6.	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	101,25	100,00	1	
7.	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,55	94,73	1	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKj IP merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar tahun 2022 termasuk kategori nilai capaian kinerja ***Sangat Berhasil*** namun demikian kedepan akan dilakukan upaya untuk menjawab tantangan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja adalah :

1. Belum tersusunnya RTKD.
2. Masih belum optimalnya Pemasaran Usaha Mikro berbasis digital.
3. Masih belum optimalnya pengembangan koperasi.

B. Saran Perbaikan

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah :

- a. Peningkatan kesempatan kerja
- b. Pengembangan Usaha Mikro
- c. Pengembangan Koperasi.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKj IP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2022 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, Pebruari 2023
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KOTA BLITAR



MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat

MISI : Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET.
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN	
			2020	2022				2020	2022			
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk 15 th keatas x 100%	69,53	70,00	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang berkompeten	Jumlah pencari kerja yang mpy ijazah min. SMA atau sederajat dan/atau ijazah kursus atau pelatihan yang telah ditempatkan/ jumlah pencari kerja x 100%	NA	80%	Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan penggunaan teknologi dalam pencarian dan penempatan kerja	
										Peningkatan kesesuaian ketrampilan pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja		
					Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yg patuh aturan (membayar sesuai umk dan punya perjanjian kerja bersama)/ jumlah perusahaan terdaftar x 100%	NA	16%	Peningkatan penyelesaian konflik industrial	Optimalisasi mediasi konflik industrial	
Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		2,02	2,05	Meningkatnya koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi Aktif / Jumlah Koperasi seluruhnya x 100%	35	35,6	Pengembangan Koperasi	Optimalisasi pengembangan koperasi	
					Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase Koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi	Jumlah Koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi /Jumlah Koperasi seluruhnya x 100%	34	35			

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET.
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal 2020	Target 2022	Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal 2020	Target 2022	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
					Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Jumlah UM yang naik kelas Thn n / Jumlah UM seluruhnya Thn n x 100%	1,72	1,8	Pengembangan Usaha Mikro	Optimalisasi Pengembangan Usaha Mikro	
					Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah WUB Thn n - Jumlah WUB Thn n-1 / Jumlah WUB Thn n-1 x 100%	NA	1,6		Inisiasi pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	83,36	83,56	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	83,36	83,56	Peningkatan Implementasi akuntabilitas kinerja pada Perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	

Blitar, 3 Agustus 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA,



Anto, SE. MM.

Blitar, 3 Agustus 2022

198903 1 009

RENCANA KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

TUJUAN : Menurunnya tingkat pengangguran
Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah

INDIKATOR : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah
Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
1	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang berkompeten	80%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	46%	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	82%	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berdasarkan klaster kompetensi	160 orang	2.292.370.300
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	77%	Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	Jumlah pencari kerja terdaftar	170 orang	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta sosialisasi pencari kerja korporasi	150 orang	310.456.500
					Persentase Jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa tenaga kerja	12%	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	30%	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang mengakses aplikasi iPK	100 orang	-
										Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang melamar kerja pada jobfair	30 orang	53.013.200
2	Meningkatnya Perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Aturan Ketenagakerjaan	16%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100%	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama	55 perusahaan	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi UMK dan peraturan ketenagakerjaan	75 orang	76.031.400

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
										Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diproses	1 kasus	3.579.500
										Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non	Jumlah dokumen hasil verifikasi/rekomendasi bidang ketenagakerjaan	1 dokumen	28.118.000
3	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	35,6	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	22%	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	3 koperasi	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam memenuhi izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	10 koperasi	56.255.200
											- Jumlah koperasi simpan pinjam yang telah didata	278 koperasi	

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
											- Jumlah koperasi simpan pinjam yang didampingi	50 koperasi	
				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	35,7%	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	71%	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	- Jumlah peserta pelatihan Akuntabilitas Koperasi	80 orang	404.200.000
											- Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	40 orang	
											- Jumlah peserta pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengawas Koperasi	40 orang	
											- Jumlah peserta pelatihan perkoperasian	80 orang	
											- Jumlah laporan money pelatihan	1 laporan	
4	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasinya	35%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	33%	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	28%	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi penerima dana bergulir yang dimonev	80 koperasi	86.605.000
											Jumlah laporan money	1 laporan	

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
										Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penerima hibah	1 lembaga	100.000.000
											Jumlah laporan money pemeriksaan lembaga penerima hibah	1 laporan	
											Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan	100 koperasi	
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	29%	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP	100%	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah peserta pelatihan akuntabilitas koperasi	100 orang	65.383.200
											Jumlah peserta pelatihan yg melakukan penilaian mandiri	100 orang	
											- Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	100 koperasi	

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	32%	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	11%	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah koperasi peserta pameran produk unggulan	30 koperasi	363.180.600
											- Jumlah aplikasi koperasi yg di update	1 aplikasi	
											Jumlah koperasi yg dilakukan update data	278 koperasi	
											Jumlah jenis produk unggulan yang laku dijual	5 produk	
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,80%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	1,8%	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	100%	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen hasil pendataan UM	1 dokumen	86.663.900

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,2%		Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan	0,4%	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	- Jumlah UM penerima dana bergulir yang dimonev	25 UM	96.994.000
											Jumlah laporan monev pengawasan dana bergulir	1 laporan	
										Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	- Jumlah UM yang mengikuti pameran produk unggulan	50 orang	216.041.400
											- Jumlah jenis produk unggulan UM yg terjual melalui pameran	1 laporan	
										Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	- Jumlah peserta pelatihan bagi UM	95 UM	330.257.000
											-Jumlah laporan Monev pelatihan	1 laporan	
6	Meningkatnya Wirausaha baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,60%	Program Pengembangan UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	1,6%	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase kelurahan yang memiliki WUB minimal 2	100%	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	- Jumlah peserta pelatihan bagi calon WUB	100 orang	183.563.300
											- Jumlah calon WUB yang didampingi	50 orang	

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	2 dokumen	5.769.700
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen pelaporan yang tersusun	3 dokumen	4.269.900
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	27 orang	3.397.134.827
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	2 event	38.373.400
											Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	2 publikasi	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 komponen	4.792.600
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	2 macam	1.493.800

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	12 jenis	11.408.800
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	29 jenis	265.265.200
											Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	750 dos	
											Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	150 porsi	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	8 jenis	27.319.200
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	24 ex	5.400.000
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	17 rakor	120.437.050
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rekening	48.089.200

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	3 unit	19.346.400
											Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 unit	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	122.280.000
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	19.346.400
											Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	

Blitar, 18 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA,



PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
TAHUN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	%	KET
1	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase Pencari kerja berkompeten	Jumlah pencari kerja yang mpy ijazah min. SMA atau sederajat dan/atau ijazah kursus atau pelatihan yang telah ditempatkan/ jumlah pencari kerja x 100%	80	66	82,50	Tidak tercapai	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.292.370.300	2.290.298.678	99,91	
								Program Penempatan tenaga kerja	363.469.700	310.276.366	85,37	
2	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Aturan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yg patuh aturan (membayar sesuai umk dan punya perjanjian kerja bersama)/ jumlah perusahaan terdaftar x 100%	16	30	187,50	Tercapai	Program Hubungan Industrial	107.728.900	97.149.600	90,18	
3	Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif / Jumlah Koperasi seluruhnya x 100%	35,6	48,94	137,47	Tercapai	Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam	56.255.200	54.628.000	97,11	
								Program Pendidikan dan latihan perkoperasian (DAK)	404.200.000	399.261.100	98,78	
4	Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	Jumlah Koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi /Jumlah Koperasi seluruhnya x 100%	35	39	111,43	Tercapai	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	186.605.000	186.605.000	100,00	
								Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	65.383.200	65.382.200	100,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	%	KET
								Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	363.180.600	362.691.900	99,87	
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Jumlah UM yang naik kelas Thn n / Jumlah UM seluruhnya Thn n x 100%	1,80	1,82	101,11	Tercapai	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	729.956.300	690.721.017	94,62	
6	Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan wirausaha baru	Jumlah WUB Thn n - Jumlah WUB Thn n-1 / Jumlah WUB Thn n-1 x 100%	1,60	1,66	103,75	Tercapai	Program Pengembangan UMKM	183.563.300	183.563.300	100,00	
7	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar		83,56	83,18	99,55	Tidak Tercapai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.161.618.069	3.942.316.627	94,73	

Blitar, Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA,



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUYANTO, SE. MM.

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd

Jabatan : Walikota Blitar

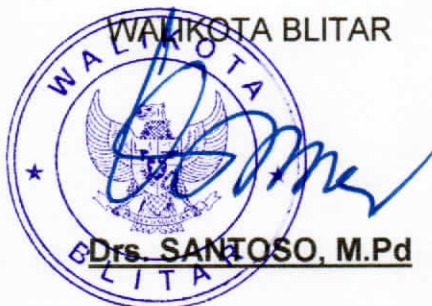
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 18 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
TENAGA KERJA



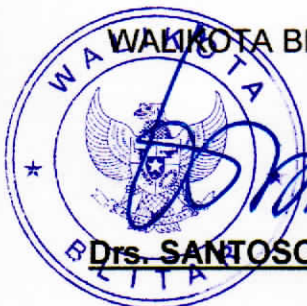
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	35,6 %
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	35 %
3	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Omzetnya Naik	1,80 %
4	Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru	1,60 %
5	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Berkompeten	80 %
6	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	16 %
7	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,56)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp 56.255.200	DAU
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 186.605.000	DAU
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 65.383.200	DAU
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 404.200.000	DAK Non Fisik (P2UKM)
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 363.180.600	DAU dan DID
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 729.952.900	DAU dan DID
7	Pengembangan UMKM	Rp 183.563.300	DAU
8	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 2.292.370.300	DBHCHT
9	Penempatan Tenaga Kerja	Rp 363.469.700	DAU
10	Hubungan Industrial	Rp 107.728.900	DAU
11	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.161.618.069	DAU
	TOTAL	Rp 8.914.327.169	

Blitar, 18 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
TENAGA KERJA


Drs. SANTOSO, M.Pd


JUYANTO, SE. MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660921 198903 1 009